



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KABUPATEN PESISIR SELATAN MENURUT PENGELUARAN

2015-2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KABUPATEN PESISIR SELATAN MENURUT PENGELUARAN

2015-2019

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PESISIR SELATAN MENURUT PENGELUARAN 2015-2019

ISBN : 978-602-5481-66-6
Nomor Publikasi : 13020.2004
Katalog : 9302020.1302
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xi + 61 Halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan

Dicetak Oleh:

CV. Adyta (Cetakan I/ *1st printed*): Juli 2020/ *July 2020*

CV. Adyta (Cetakan II/ *2nd printed*): Agustus 2020/ *August 2020*

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan (UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESISIR SELATAN MENURUT PENGELUARAN
2015-2019**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:

Yudi Yos Elvin, S.Si, M.Si

Penulis:

Indah Sri Ramadhani

Pengolah Data:

Ir. Sunaryon

KATA PENGANTAR

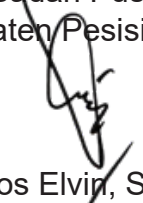
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori) serta Ekspor Neto (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini dan publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010 serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Ucapan terima kasih kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang. Sangat disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi selanjutnya. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Painan, Mei 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pesisir Selatan



Yudi Yos Elvin, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TABEL		viii
DAFTAR GAMBAR		x
DAFTAR LAMPIRAN		xi
BAB I	PENDAHULUAN	3
	1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	5
	1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB	6
BAB II	METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
	2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	13
	2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	15
	2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	17
	2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20
	2.5 Perubahan Inventori	23
	2.6 Ekspor Impor	25
BAB III	TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN BERDASARKAN PENGELUARAN TAHUN 2015-2019	27
	3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	29
	3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	34
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015-2019	45
	4.1 Produk Domestik Regional Bruto (Nominal)	47
	4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	48
	4.3 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	49
BAB V	PENUTUP	51
LAMPIRAN		55

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Perubahan Klasifikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	10
Tabel 2.	Deflator yang Digunakan untuk Mengestimasi Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan	20
Tabel 3.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2015-2019	30
Tabel 4.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2015-2019	30
Tabel 5.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	32
Tabel 6.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Peneluaran (Persen), 2015-2019	33
Tabel 7.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	33
Tabel 8.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019	35
Tabel 9.	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	36
Tabel 10.	Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	37
Tabel 11.	Laju Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	37
Tabel 12.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019	38
Tabel 13.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019	39
Tabel 14.	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019	41
Tabel 15.	Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019	42

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 16.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019	43
Tabel 17.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019	44
Tabel 18.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019	47
Tabel 19.	Distribusi Pengeluaran Konsumsi Akhir Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019	48
Tabel 20.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019	49

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2015-2019	31
Gambar 2.	Laju Pertumbuhan Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Rata-rata per Rumah Tangga dan Rata-rata per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019	35

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2015-2019	57
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2015-2019	57
Lampiran 3.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	58
Lampiran 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019	58
Lampiran 5.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran, 2015-2019	59
Lampiran 6.	Laju Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran, 2015-2019	59

BAB I

PENDAHULUAN

PDRB

atas dasar
harga berlaku

digunakan untuk melihat pergeseran
serta struktur ekonomi

PDRB

atas dasar
harga konstan

digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan ekonomi antar periode
(triwulanan atau tahunan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah selain bentuk tampilan lain seperti; PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB menurut pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB menurut pengeluaran menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik, luar wilayah, bahkan luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB menurut pengeluaran ini seperti; variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik, serta Ekspor dan Impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Meskipun demikian, PDRB menurut pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB menurut lapangan usaha menggambarkan aktivitas produksi serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹, sedangkan PDRB menurut pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB menurut pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun luar negeri. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep², penghitungan PDRB dari dua sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²*Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F number 30 United Nations)*

estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul yang dinamakan selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian, PDRB menurut pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik dan digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu perdagangan produk impor terus berkembang, baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB menurut lapangan usaha (Y) sama besar dengan PDRB menurut pengeluaran (E). Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB menurut pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB diharapkan tidak lagi mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB menurut pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³ yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir. Dari sudut pandang lain, PDRB menurut pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “output akhir (*final output*)”. Mengaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan Keynesian sebagai berikut:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB menurut lapangan usaha
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB menurut lapangan usaha akan “identik” dengan PDRB menurut pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB menurut lapangan usaha, berdasarkan PDRB menurut

³Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik. Disebut juga sebagai pendekatan “riil”. Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut.

pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti; nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB menurut pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia, kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya adalah aktivitas produksi, konsumsi dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- ♦ Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- ♦ Meningkatkan kualitas PDRB;
- ♦ Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- ♦ Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- ♦ Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- ♦ Perubahan input data untuk keperluan modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 Sebagai Tahun Dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasari atas beberapa alasan sebagai berikut:

- ♦ Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- ♦ Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- ♦ Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar yang harus dilakukan setiap 5

(lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;

- ♦ Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- ♦ Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (Producers Price Index);
- ♦ Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB Tahun Dasar 2010

Terdapat 118 revisi pada SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi ke dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- ♦ Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contohnya adalah nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB, seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB, seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

⁴SNA1993, para 16.76: “constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing”

- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Software komputer (*computer software and database/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan database yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

♦ Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan diestimasi dengan metode FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposit*), bunga pinjaman (*loan*) dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge* (IBSC).

♦ Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*basic price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

♦ Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC Rev. 4) dan *Central Product Classification* (CPC Rev. 2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Berikut adalah ringkasan perubahan klasifikasi produk domestik regional bruto menurut pengeluaran tahun dasar 2000 dan 2010:

Tabel 1. Perubahan Klasifikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
(1)	(2)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Pembentukan Modal Tetap Bruto	Pembentukan Modal Tetap Bruto
Perubahan Inventori	Perubahan Inventori
Ekspor	Ekspor
Impor	Impor

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

PK-RT

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

PK-LNPRT

Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga
Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga

PK-P

Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

PMTB

Pembentukan Modal Tetap Bruto

PI

Perubahan Inventori

X-M

Ekspor Neto

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

2.1.1. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

2.1.2. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, terutama kelompok makanan dan perumahan.

2.1.3. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

- ♦ Makanan dan minuman tidak beralkohol
- ♦ Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
- ♦ Pakaian dan alas kaki
- ♦ Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
- ♦ Mebel, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin

- ♦ Kesehatan
- ♦ Angkutan
- ♦ Komunikasi
- ♦ Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
- ♦ Pendidikan
- ♦ Penyediaan makan, minum dan penginapan/hotel
- ♦ Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PKRT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

- ♦ Makanan, minuman dan rokok
- ♦ Pakaian dan alas kaki
- ♦ Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga
- ♦ Kesehatan dan pendidikan
- ♦ Transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya
- ♦ Hotel dan restoran
- ♦ Lainnya

2.1.4. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PKRT bersumber dari:

- ♦ Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- ♦ Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- ♦ Sensus Penduduk 2010, BPS
- ♦ Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- ♦ Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

2.1.5. Metode Estimasi

Komponen PKRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

- ◆ Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas (untuk PKRT Tahunan);
- ◆ Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun kemudian dikalikan 12 (PKRT Tahunan) ;
- ◆ Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
- ◆ Terhadap data poin 3 kemudian dilakukan kontrol atau koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
- ◆ Diperoleh nilai PKRT Tahunan atas dasar harga berlaku;
- ◆ Susun Indeks implisit PKRT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
- ◆ Nilai PKRT atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT

2.2.1. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

2.2.2. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- ◆ LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- ♦ Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- ♦ Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- ♦ Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus;
- ♦ Istilah non-profit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

2.2.3. Cakupan

Nilai PKLNPRRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- ♦ Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain
- ♦ Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- ♦ Penyusutan
- ♦ Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan sebagainya

2.2.4. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PKLNPRT bersumber dari:

- ♦ Survei Khusus Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (SKLNPRT), BPS
- ♦ SKLNP Triwulanan (SKLNPT), BPS
- ♦ Hasil updating direktori LNPRT, BPS
- ♦ Indeks Harga Konsumen, BPS

2.2.5. Metode Estimasi

Komponen PKLNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

- ♦ Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SKLNP;
- ♦ Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari direktori LNPRT;
- ♦ Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol atau koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SKLNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai event seperti Munas, Rakerda, dan penanganan bencana;
- ♦ Diperoleh nilai PKLNPRT Tahunan atas dasar harga berlaku;
- ♦ Susun Indeks implisit PKLNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
- ♦ Nilai PKLNPRT atas dasar harga konstan diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

2.3.1. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai

pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

2.3.2. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, nilai output dari Bank Indonesia dan kemudian dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum mencakup kegiatan sebagai berikut:

- ◆ Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contohnya adalah aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang tersebut itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
- ◆ Memproduksi jasa. Contohnya adalah aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

2.3.3. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

- ◆ PKP kabupaten/kota mencakup: a). PKP desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PKP kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PKP pusat yang merupakan bagian dari PKP kabupaten/kota.

2.3.4. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PKP Kabupaten/Kota Tahunan adalah:

- ◆ Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan BAPPEDA
- ◆ Statistik Keuangan Daerah, BPS
- ◆ Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- ◆ Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan BAPPEDA
- ◆ Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- ◆ Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

2.3.5. Metode Estimasi

Komponen PKP Kabupaten/Kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

PKP ADHB = Output – Penjualan barang dan jasa + *Social transfers in the form of purchased market production* + Output Bank Indonesia

Output non-pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain. Komponen PKP Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan. PKP atas dasar harga konstan diestimasi dengan mendeflasi PKP atas dasar harga berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Tabel 2. Deflator yang Digunakan untuk Mengestimasi Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan Barang dan Jasa	IHK umum	Provinsi atau Kabupaten/Kota terdekat
Social Transfer in the Form of Purchased Market Production	IHK umum	Provinsi atau Kabupaten/ Kota terdekat
Output Bank Indonesia		Neraca Jasa

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

2.4.1. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2.4.2. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas

pada pihak lain. Pengecualian pada kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*consumption of fixed capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

2.4.3. Cakupan

Cakupan Pembentukan Modal Tetap Bruto antara lain sebagai berikut:

- ♦ Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*) dan, produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
- ♦ Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- ♦ Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

2.4.4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk mengestimasi nilai PMTB adalah:

- ♦ Output industri konstruksi, BPS
- ♦ Nilai impor 2 digit HS, BPS
- ♦ Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- ♦ Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- ♦ Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- ♦ Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- ♦ Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas), BPS

- ♦ Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum, BPS
- ♦ Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- ♦ Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ♦ Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

2.4.5. Metode Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung, tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ♦ Metode Langsung:

PMTB ADHB (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB ADHK (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mendeflasi PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB sebagai berikut:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ♦ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply

PMTB ADHB = Total *Supply* Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi

PMTB ADHK_(t) = PMTB atas dasar harga konstan_(t-1) x Indeks Produksi_(t)

2.5. Perubahan Inventori

2.5.1. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen perubahan inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto atau lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.2. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa

komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

2.5.3. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- ♦ Inventori menurut industri seperti produk hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih serta konstruksi;
- ♦ Berbagai jenis bahan baku dan penolong (material and supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- ♦ Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- ♦ Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- ♦ Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- ♦ Ternak untuk tujuan dipotong;
- ♦ Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan;
- ♦ Persediaan pada pemerintah yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir dan gandum.

2.5.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

- ♦ Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- ♦ Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, data sekunder dari luar BPS;
- ♦ Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;

- ◆ Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- ◆ Data komoditas perkebunan;
- ◆ Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- ◆ Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) terpilih;
- ◆ Data persediaan beras, Bulog;
- ◆ Data semen, Asosiasi Semen Indonesia;
- ◆ Data gula, Dewan Gula Indonesia;
- ◆ Data ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

2.5.5. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi tergantung jenis komoditasnya.

◆ Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI ADHB} = (\text{Volume inventori}_{(t)} - \text{Volume inventori}_{(t-1)}) \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{PI ADHK} = \text{PI ADHB} \div \text{IHPB}$$

◆ Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI ADHK} = \text{Inventori ADHB}_{(t)} / \text{IHPB}_{(t)} - \text{Inventori ADHK}_{(t-1)} / \text{IHPB}_{(t-1)}$$

$$\text{PI ADHB} = \text{PI ADHK} \times \text{IHPB rata-rata}_{(t)}$$

2.6. Ekspor Impor

2.6.1. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam

barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

2.6.2. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

2.6.3. Cakupan

Ekspor-impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- ♦ Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- ♦ Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

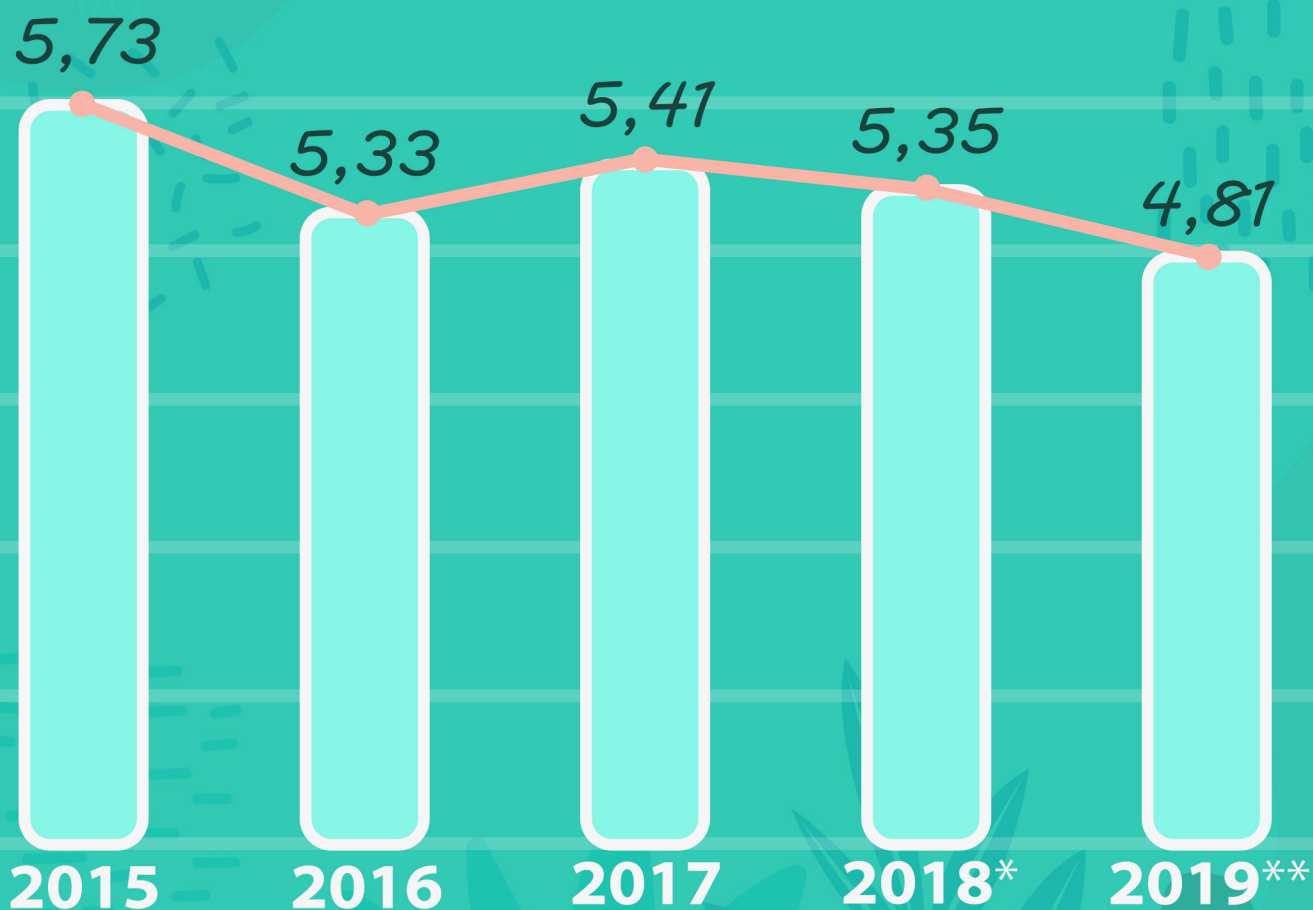
2.6.4. Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

*Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
(Persen), 2015-2019*



*angka sementara

**angka sangat sementara

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

3.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar baru (2010=100) menggantikan tahun dasar yang lama (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun selama periode 2015-2019 adalah sebesar 5,73%; 5,33%; 5,41%; 5,35%; dan 4,81%. Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 sangat melemah hingga mencapai angka dibawah 5 (lima) persen. Penurunan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PKRT) yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode 2015-2019, PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan secara nominal, yakni sebesar 10.197,17 miliar rupiah (2015); 11.271,40 miliar rupiah (2016); 12.069,52 miliar rupiah (2017); 13.049,68 miliar rupiah (2018); dan 14.044,81 miliar rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi juga diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir. Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB pada masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan

menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, nilai PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2015-2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	5.621,03	6.080,21	6.517,29	7.067,22	7.711,44
2	Konsumsi Akhir LNPRT	116,84	128,57	132,72	144,00	165,55
3	Konsumsi Akhir Pemerintah	1.362,78	1.454,25	1.501,56	1.621,48	1.763,28
4	PMTB	3.149,46	3.435,99	3.659,13	3.911,70	4.239,25
5	Perubahan Inventori	316,89	144,87	7,32	10,52	-5,51
6	Ekspor	5.851,07	7.052,29	8.536,86	8.752,30	9.282,97
7	Impor	6.220,89	7.024,78	8.285,36	8.457,54	9.112,17
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)		10.197,17	11.271,40	12.069,52	13.049,68	14.044,81

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Produk Dometik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2015-2019

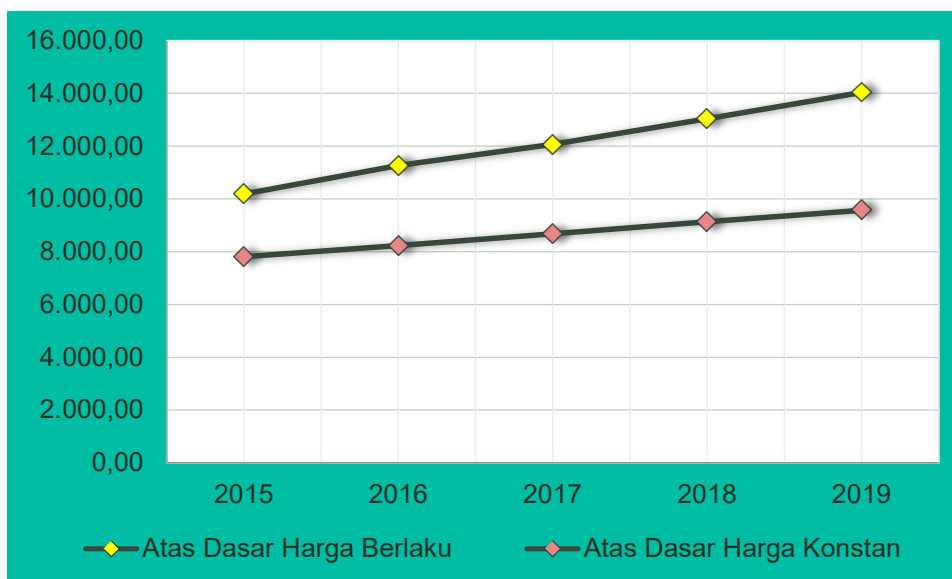
Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	4.204,45	4.403,46	4.632,33	4.859,46	5.080,68
2	Konsumsi Akhir LNPRT	91,59	95,93	100,16	106,23	119,88
3	Konsumsi Akhir Pemerintah	981,59	990,68	983,46	1.031,77	1.084,46
4	PMTB	2.376,50	2.539,10	2.653,75	2.746,66	2.870,70
5	Perubahan Inventori	237,37	104,75	5,17	7,18	-3,36
6	Ekspor	4.917,80	5.430,57	6.012,08	6.123,67	6.552,43
7	Impor	4.993,08	5.331,91	5.708,89	5.732,27	6.121,93
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)		7.816,21	8.232,59	8.678,05	9.142,70	9.582,87

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Gambar 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2015-2019



Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh variabel harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor (X) dan impor (M). Selama periode 2015-2019, sebagian besar produk yang dikonsumsi di wilayah domestik masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Diluar itu, ekspor juga mempunyai peran yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Sebanyak 66,10 persen produk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 mampu menembus pasar internasional dan antar daerah. Selain melakukan ekspor, sebanyak 64,88 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk impor. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif cukup besar dengan kontribusi melebihi 30 persen selama 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan konsumsi akhir pemerintah selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada rentang 12-14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Tabel 5. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	55,12	53,94	54,00	54,16	54,91
2	Konsumsi Akhir LNPRT	1,15	1,14	1,10	1,10	1,18
3	Konsumsi Akhir Pemerintah	13,36	12,90	12,44	12,43	12,55
4	PMTB	30,89	30,48	30,32	29,98	30,18
5	Perubahan Inventori	3,11	1,29	0,06	0,08	-0,04
6	Ekspor	57,38	62,57	70,73	67,07	66,10
7	Impor	61,01	62,32	68,65	64,81	64,88
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor menunjukkan bahwa ekspor bernilai lebih tinggi daripada impor pada tahun 2019. Dengan kata lain, neraca perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 mengalami surplus. Dimana jumlah barang yang diperdagangkan keluar wilayah lebih besar daripada barang yang didatangkan dari luar wilayah.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Dengan kata lain, pertumbuhan riil PDRB memberikan gambaran kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2015-2019 terus berfluktuasi dan cenderung melemah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 mencapai 5,73 persen dan mengalami penurunan hingga mencapai 4,81 persen di tahun 2019. Jika dirinci berdasarkan komponen pengeluaran, sebagian komponen justru mengalami peningkatan laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba atau konsumsi lembaga non-profit yang melayani masyarakat mencapai 12,85 persen pada tahun 2019, meningkat sebanyak 6,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi pemerintah dan PMTB juga mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 4,91 persen dan 3,50 persen pada tahun sebelumnya menjadi 5,11 persen dan 4,52 persen pada tahun 2019.

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	4,37	4,73	5,20	4,90	4,55
2	Konsumsi Akhir LNPRT	3,50	4,74	4,40	6,07	12,85
3	Konsumsi Akhir Pemerintah	9,04	0,93	-0,73	4,91	5,11
4	PMTB	4,81	6,84	4,52	3,50	4,52
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor	-	-	-	-	-
7	Impor	-	-	-	-	-
PDRB		5,73	5,33	5,41	5,35	4,81

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	133,69	138,08	140,69	145,43	151,78
2	Konsumsi Akhir LNPRT	127,56	134,02	132,52	135,55	138,09
3	Konsumsi Akhir Pemerintah	138,83	146,79	152,68	157,15	162,60
4	PMTB	132,53	135,32	137,89	142,42	147,67
5	Perubahan Inventori	133,50	138,30	141,47	146,46	163,90
6	Ekspor	118,98	129,86	142,00	142,93	141,67
7	Impor	124,59	131,75	145,13	147,54	148,84
PDRB		130,46	136,91	139,08	142,73	146,56

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri), menunjukkan peningkatan. Secara total, indeks implisit pada tahun 2015 adalah sebesar 130,46

persen dan terus meningkat hingga menjadi 146,56 persen pada tahun 2019.

3.2. Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT, pemerintah dan sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2015-2019, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari segi nominal (ADHB) maupun riil (ADHK). Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang kemudian akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB kembali mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Kontribusi ini sempat menurun pada tahun 2016 menjadi 53,94 persen, namun perlahan kembali meningkat hingga mencapai 54,91 persen pada tahun 2019. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun, pendapatan masyarakat sebagai pelaku ekonomi juga meningkat. Hal ini terlihat melalui peningkatan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang tercermin baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Seiring dengan total pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Pesisir Selatan yang terus meningkat selama periode 2015-2019, rata-rata konsumsi akhir per rumah tangga dan per kapita juga meningkat. Pada tahun 2019, setiap rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan rata-rata menghabiskan sekitar 47,52 juta rupiah dalam setahun untuk pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun bukan makanan.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019

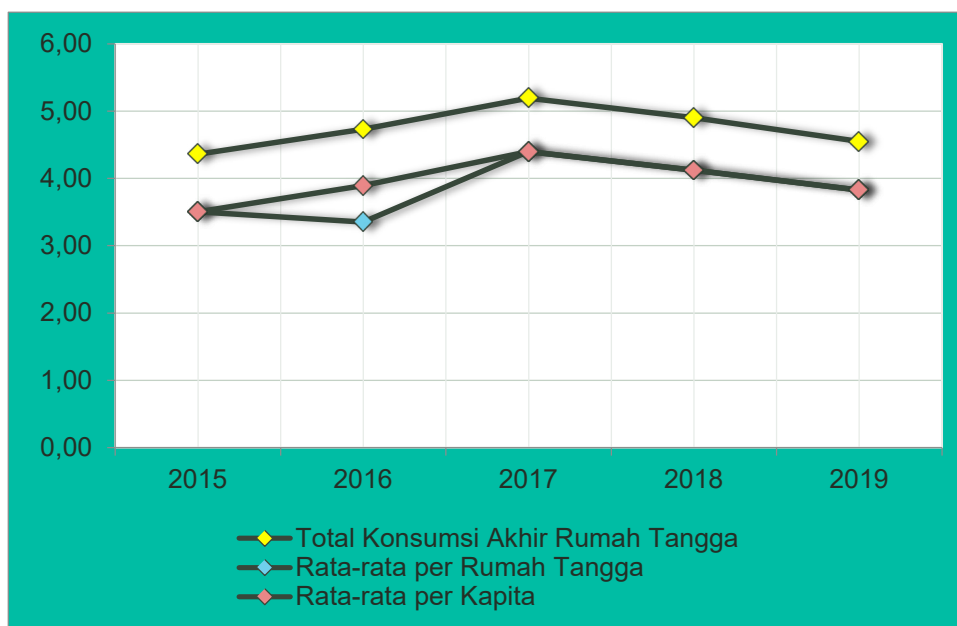
Uraian		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga (Miliar Rupiah)						
a.	ADHB	5.621,03	6.080,21	6.517,29	7.067,22	7.711,44
b.	ADHK 2010	4.204,45	4.403,46	4.632,33	4.859,46	5.080,68
Proporsi Terhadap PDRB ADHB (Persen)		55,12	53,94	54,00	54,16	54,91
Rata-rata Konsumsi Akhir Rumah Tangga ADHK 2010 (Juta Rupiah)						
a.	Per Rumah Tangga	40,73	42,10	43,95	45,76	47,52
b.	Per Kapita	9,34	9,70	10,13	10,55	10,95
Laju Pertumbuhan (Persen)						
a.	Konsumsi Akhir Rumah Tangga ADHK 2010	4,37	4,73	5,20	4,90	4,55
b.	Rata-rata per Rumah Tangga	3,51	3,35	4,40	4,12	3,83
c.	Rata-rata per Kapita	3,51	3,89	4,40	4,12	3,83
Jumlah Rumah Tangga (Unit)		103.217	104.596	105.394	106.185	106.925
Jumlah Penduduk (Orang)		450.186	453.822	457.285	460.716	463.923

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Rata-rata per Rumah Tangga dan Rata-rata per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019



Jika dirinci menurut kelompok pengeluarannya, terlihat jika konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan paling banyak terserap pada kelompok makanan, minuman dan rokok. Meskipun selama periode 2015-2019 angkanya fluktuatif, konsumsi akhir rumah tangga yang terserap untuk keperluan makanan, minuman dan rokok selalu hampir mencapai setengah dari total konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2019, total konsumsi makanan, minuman dan rokok masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 47,54 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terbesar kedua adalah untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yang mencapai 20,74 persen. Di samping kedua kelompok tersebut, kontribusi kelompok lainnya masih kurang dari 10 persen. Kontribusi terkecil berasal dari kelompok hotel dan restoran sebesar 3,83 persen.

Tabel 9. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Kelompok Konsumsi Rumah Tangga		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Makanan, Minuman dan Rokok	48,07	48,09	47,57	48,27	47,54
2	Pakaian dan Alas Kaki	3,86	3,85	3,85	3,87	3,89
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,51	9,33	9,40	9,28	9,13
4	Kesehatan dan Pendidikan	8,01	8,33	8,35	8,26	8,27
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	20,66	20,57	20,97	20,57	20,74
6	Hotel dan Restoran	3,71	3,78	3,79	3,82	3,87
7	Lainnya	6,18	6,04	6,07	5,92	6,57
Total Konsumsi Rumah Tangga		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dari sisi pertumbuhan riil, seluruh kelompok pengeluaran rumah tangga terus berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun kelompok hotel dan restoran memberikan kontribusi terkecil pada tahun 2019, kelompok ini memiliki laju pertumbuhan yang paling pesat diantara kelompok konsumsi rumah tangga lainnya. Pertumbuhan riil ini menunjukkan perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (*volume*) dari waktu ke waktu. Peningkatan laju pertumbuhan menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Kelompok Konsumsi Rumah Tangga		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Makanan, Minuman dan Rokok	4,18	4,35	4,86	4,97	3,85
2	Pakaian dan Alas Kaki	4,29	5,03	5,35	5,14	5,40
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,28	3,72	4,15	4,43	5,29
4	Kesehatan dan Pendidikan	3,37	6,24	4,98	5,07	5,24
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,78	6,04	7,13	5,08	5,33
6	Hotel dan Restoran	4,43	5,99	5,87	5,41	6,84
7	Lainnya	5,70	2,53	2,87	3,86	3,68
Total Konsumsi Rumah Tangga		4,37	4,73	5,20	4,90	4,55

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tingkat perubahan harga implisit yang disajikan dalam Tabel 11 menunjukkan bahwa seluruh kelompok komponen konsumsi rumah tangga setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan yang positif. Rincian perubahan harga pada kelompok makanan, minuman dan rokok setiap tahunnya adalah sebesar 5,36 persen (2015); 3,69 persen (2016); 1,13 persen (2017); 4,82 persen (2018); dan 3,47 persen (2019).

Tabel 11. Laju Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Kelompok Konsumsi Rumah Tangga		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Makanan, Minuman dan Rokok	5,36	3,69	1,13	4,82	3,47
2	Pakaian dan Alas Kaki	4,45	2,89	1,65	3,68	4,18
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,35	2,34	3,61	2,60	1,87
4	Kesehatan dan Pendidikan	10,26	5,88	2,36	2,11	3,77
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	7,33	1,56	1,97	1,26	4,42
6	Hotel dan Restoran	6,42	4,06	1,53	3,56	3,52
7	Lainnya	6,35	3,20	4,69	1,76	16,80
Total Konsumsi Rumah Tangga		6,09	3,28	1,89	3,37	4,36

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

3.2.2. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil, bahkan termasuk sebagai yang paling kecil jika dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Oleh karena itu, peranan lembaga ini dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan semestinya dapat lebih ditingkatkan. Secara nominal, aktivitas LNPRT di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 mencapai 165,55 miliar rupiah atas dasar harga berlaku dan 119,88 miliar rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010. Nilai tersebut hanya 1,18 persen bagian dari total perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019

Uraian		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Akhir LNPRT (Miliar Rupiah)						
a.	ADHB	116,84	128,57	132,72	144,00	165,55
b.	ADHK 2010	91,59	95,93	100,16	106,23	119,88
Proporsi Terhadap PDRB ADHB (Persen)		1,15	1,14	1,10	1,10	1,18
Laju Pertumbuhan (Persen)		3,50	4,74	4,40	6,07	12,85

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tingkat pertumbuhan konsumsi akhir LNPRT Kabupaten Pesisir Selatan kembali meningkat selama 2 (dua) tahun terakhir. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan konsumsi akhir LNPRT meningkat menjadi 6,07 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4,40 persen. Kenaikan kembali di tahun 2018 ini disebabkan karena adanya persiapan untuk pemilihan umum presiden dan anggota legislatif yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya, laju pertumbuhan konsumsi akhir LNPRT terus meningkat menjadi 12,85 persen karena pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terdiri dari pengeluaran konsumsi individu dan pengeluaran konsumsi kolektif. Barang dan jasa konsumsi individu merupakan barang dan jasa privat dengan ciri-ciri *scarcity*, *excludable consumption*

dan *rivalrous competition*. *Scarcity* adalah adanya kelangkaan atau keterbatasan dalam jumlah. *Excludable consumption* adalah ketika konsumsi suatu barang terbatas hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). *Rivalrous competition* adalah dimana konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit dan puskesmas, serta jasa pendidikan di sekolah atau universitas negeri.

Barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri *non rivalry* dan *non excludable*. *Non rivalry* yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap satu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengonsumsi barang tersebut. *Non excludable* adalah apabila suatu barang publik tersedia dan tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dengan kata lain, setiap orang memiliki akses terhadap barang tersebut. Contoh barang dan jasa kolektif yang dihasilkan pemerintah adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan polisi.

Tabel 13. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019

Uraian		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Akhir Pemerintah (Miliar Rupiah)						
a.	ADHB	1.362,78	1.454,25	1.501,56	1.621,48	1.763,28
b.	ADHK 2010	981,59	990,68	983,46	1.031,77	1.084,46
Proporsi Terhadap PDRB ADHB (Persen)		13,36	12,90	12,44	12,43	12,55
Laju Pertumbuhan (Persen)		9,04	0,93	-0,73	4,91	5,11
Rata-rata Konsumsi Akhir per Kapita (Juta Rupiah)						
a.	ADHB	3,03	3,20	3,28	3,52	3,80
b.	ADHK 2010	2,18	2,18	2,15	2,24	2,34
Jumlah Penduduk (Orang)		450.186	453.822	457.285	460.716	463.923

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Secara total atas dasar harga berlaku, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.362,78 miliar rupiah. Angka tersebut terus meningkat menjadi 1.763,28

miliar rupiah di tahun 2019. Namun secara total atas dasar harga konstan 2010 sempat terjadi sedikit penurunan pada tahun 2017.

Apabila ditinjau dari kontribusi masing-masing komponen terhadap PDRB menurut pengeluaran, distribusi konsumsi akhir pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan setelah terus mengalami penurunan tahun-tahun sebelumnya. Persentasenya pada tahun 2015 adalah sebesar 13,36 persen dan terus turun hingga menjadi 12,43 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 meningkat sebesar 0,12 persen hingga mencapai 12,55 persen. Dari segi pertumbuhan, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada kurun waktu 2015-2019 menunjukkan pergerakan yang sangat fluktuatif. Capaian laju pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah pada tahun 2015 sebesar 9,04 persen, sedangkan capaian laju pertumbuhan terendah adalah pada tahun 2017 sebesar -0,73 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, yang kemudian diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi akhir pemerintah per kapita. Pada tahun 2015, rata-rata konsumsi akhir pemerintah ADHB per kapita adalah sebesar 3,03 juta rupiah. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 3,80 juta rupiah pada tahun 2019.

3.2.4. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun hasil impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT serta pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu

2015-2019 bergerak secara fluktuatif. Pertumbuhan paling cepat terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,84 persen dan paling lambat pada tahun 2018 sebesar 3,50 persen. Subkomponen bangunan merupakan komponen dengan distribusi terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto. Nilai subkomponen ini atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 2.890,57 miliar rupiah atau 68,19 persen dari total nilai komponen PMTB. Sedangkan nilai subkomponen non bangunan atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.348,67 miliar rupiah atau 31,81 persen dari total nilai komponen PMTB. Secara total, distribusi komponen PMTB terhadap total PDRB sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2019 setelah mengalami penurunan selama beberapa tahun ke belakang. Peningkatan juga terjadi pada laju pertumbuhannya dari 3,50 persen pada tahun sebelumnya menjadi 4,52 persen pada tahun 2019.

Tabel 14. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Pesir Selatan, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Pembentukan Modal Tetap Bruto (Miliar Rupiah)					
a. ADHB	3.149,46	3.435,99	3.659,13	3.911,70	4.239,25
b. ADHK 2010	2.376,50	2.539,10	2.653,75	2.746,66	2.870,70
Proporsi Terhadap PDRB ADHB (Persen)	30,89	30,48	30,32	29,98	30,18
Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)					
a. Bangunan	2.051,96	2.250,84	2.422,08	2.639,75	2.890,57
Proporsi Terhadap Total PMTB (Persen)	65,15	65,51	66,19	67,48	68,19
b. Non Bangunan	1.097,50	1.185,15	1.237,04	1.271,96	1.348,67
Proporsi Terhadap Total PMTB (Persen)	34,85	34,49	33,81	32,52	31,81
Laju Pertumbuhan (Persen)					
a. Total PMTB	4,81	6,84	4,52	3,50	4,52
b. PMTB Bangunan	5,91	7,87	6,19	4,77	5,11
c. PMTB Non Bangunan	2,81	4,90	1,27	0,92	3,26

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

3.2.5. Perkembangan Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam

proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki tanda positif ataupun negatif disamping komponen *net* ekspor. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti telah terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terdapat adanya pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 15. Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019

Uraian		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori (Miliar Rupiah)						
a.	ADHB	316,89	144,87	7,32	10,52	-5,51
b.	ADHK 2010	237,37	104,75	5,17	7,18	-3,36
Proporsi Terhadap PDRB ADHB (Persen)		3,11	1,29	0,06	0,08	-0,04

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Secara nilai atas dasar harga berlaku, selama periode 2015-2019 distribusi perubahan inventori dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan sangat fluktuatif dari bernilai negatif hingga positif. Proporsi terbesar selama kurun waktu tersebut adalah pada tahun 2015 sebesar 3,11 persen dan yang terendah adalah pada tahun 2019 sebesar -0,04 persen.

3.2.6. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang dikonsumsi baik di wilayah ekonomi domestik maupun yang dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula di dalamnya pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Kegiatan ekspor barang dan jasa di Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun

waktu 2015-2019 memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, ekspor barang dan jasa Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 secara berturut-turut adalah sebesar 5.851,07 miliar rupiah dan 4.917,80 miliar rupiah. Angka tersebut terus meningkat hingga masing-masing mencapai 9.282,97 miliar rupiah dan 6.552,43 miliar rupiah pada tahun 2018. Peningkatan terjadi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi dan pengaruh faktor produksi lainnya.

Tabel 16. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019

Uraian		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rupiah)						
a.	ADHB	5.851,07	7.052,29	8.536,86	8.752,30	9.282,97
b.	ADHK 2010	4.917,80	5.430,57	6.012,08	6.123,67	6.552,43
Proporsi Terhadap PDRB ADHB (Persen)		57,38	62,57	70,73	67,07	66,10

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Meskipun secara nominal komponen ekspor barang dan jasa terus mengalami peningkatan, proporsi nya terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun terakhir. Pertumbuhan proporsi ekspor barang dan jasa selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 57,38 persen (2015), 62,57 persen (2016), 70,73 persen (2017), 67,07 persen (2018) dan 66,10 persen (2019).

3.2.7. Perkembangan Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah), PMTB (termasuk inventori) maupun ekspor mengandung produk yang berasal dari impor. PDRB Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik. Cara mengeluarkannya adalah dengan mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impor. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada

tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Pesisir Selatan di luar domestik, baik berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain maupun luar negeri.

Tabel 17. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019

Uraian		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Impor Barang dan Jasa (Miliar Rupiah)						
a.	ADHB	6.220,89	7.024,78	8.285,36	8.457,54	9.112,17
b.	ADHK 2010	4.993,08	5.331,91	5.708,89	5.732,27	6.121,93
Proporsi Terhadap PDRB ADHB (Persen)		61,01	62,32	68,65	64,81	64,88

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

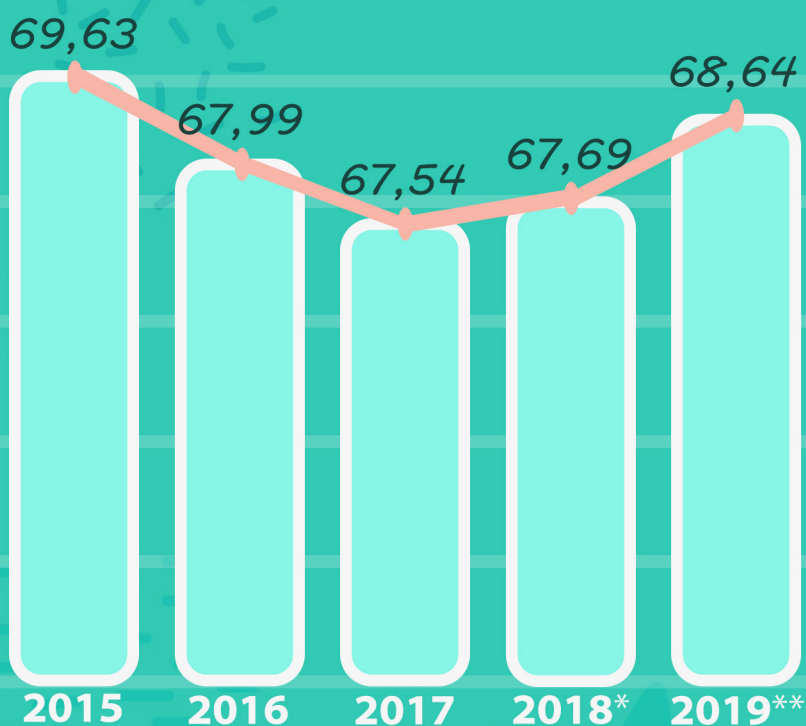
Secara total, kegiatan impor barang dan jasa Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 2015-2019 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, impor barang dan jasa Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku adalah sebesar 6.220,89 miliar rupiah. Jumlah ini terus meningkat menjadi 7.024,78 miliar rupiah pada tahun 2016, 8.285,36 miliar rupiah pada tahun 2017, 8.457,54 miliar rupiah pada tahun 2018 dan 9.112,17 miliar rupiah pada tahun 2019. Peningkatan ini terus terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi dan pengaruh faktor produksi lainnya. Apabila dilihat dari proporsinya terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan, kontribusinya selama periode 2015-2019 berkisar antara 61-69 persen. Kontribusi terendah adalah pada tahun 2015, yaitu sebesar 61,01 persen. Kontribusi pada tahun-tahun berikutnya terus meningkat hingga mencapai kontribusi tertinggi pada tahun 2017 sebesar 68,65 persen.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PESISIR SELATAN

*PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku per Kapita, 2019***

30,27
juta rupiah



*Proporsi Pengeluaran
Konsumsi Akhir Terhadap
PDRB ADHB (Persen),
2015-2019*

*angka sementara

**angka sangat sementara

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PESISIR SELATAN

4.1. Produk Domestik Regional Bruto (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah ekonomi domestik yang di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas” karena menjelaskan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan produk domestik yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari seri data PDRB menurut pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain seperti rumah tangga dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan di suatu wilayah maka disajikan data PDRB per kapita.

Tabel 18. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019

Uraian		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)						
a.	ADHB	10.197,17	11.271,40	12.069,52	13.049,68	14.044,81
b.	ADHK 2010	7.816,21	8.232,59	8.678,05	9.142,70	9.582,87
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (Persen)		5,73	5,33	5,41	5,35	4,81
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Juta Rupiah)						
a.	ADHB	22,65	24,84	26,39	28,32	30,27
b.	ADHK 2010	17,36	18,14	18,98	19,84	20,66
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (Persen)		4,86	4,48	4,61	4,57	4,09
Jumlah Penduduk (Orang)		450.186	453.822	457.285	460.716	463.923

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, PDRB per kapita Kabupaten Pesisir Selatan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Pesisir Selatan rata-rata mampu

menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

4.2. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir, baik yang berasal dari produk domestik maupun impor, untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, akan tetapi ketiganya sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 19. Distribusi Pengeluaran Konsumsi Akhir Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019

Uraian		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Akhir ADHB (Miliar Rupiah)						
a.	Konsumsi Rumah Tangga	5.621,03	6.080,21	6.517,29	7.067,22	7.711,44
b.	Konsumsi LNPRT	116,84	128,57	132,72	144,00	165,55
c.	Konsumsi Pemerintah	1.362,78	1.454,25	1.501,56	1.621,48	1.763,28
Total Pengeluaran Konsumsi Akhir		7.100,65	7.663,03	8.151,58	8.832,70	9.640,27
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)						
a.	ADHB	10.197,17	11.271,40	12.069,52	13.049,68	14.044,81
Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB ADHB (Persen)		69,63	67,99	67,54	67,69	68,64

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dapat dilihat bahwa sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Pesisir Selatan digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Secara total, pengeluaran konsumsi akhir Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, total pengeluaran konsumsi akhir mencapai 9.640,27 miliar rupiah atau sebesar 68,64 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagian besar dari konsumsi akhir tersebut berasal dari komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga.

4.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah". Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output. Dengan kata lain dapat diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana :

I_t = PMTB tahun ke-(t)

Y_t = Output tahun ke-(t)

Y_{t-1} = Output tahun ke-(t-1)

Tabel 20. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Pesisir Selatan, 2015- 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	7.816,21	8.232,59	8.678,05	9.142,70	9.582,87
Perubahan (PDRB _t - PDRB _{t-1})	423,68	416,38	445,46	464,64	440,17
PMTB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	2.376,50	2.539,10	2.653,75	2.746,66	2.870,70
ICOR	5,61	6,10	5,96	5,91	6,52

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

ICOR Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 kembali meningkat setelah sempat menurun selama 2 (dua) tahun sebelumnya. Nilai ICOR Kabupaten Pesisir Selatan

tahun 2019 adalah sebesar 6,52 persen, meningkat 0,61 dari tahun sebelumnya. ICOR adalah rasio antara penambahan modal dengan penambahan pengeluaran, sehingga nilainya merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Nilai ICOR yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang masih rendah. Nilai ICOR Kabupaten Pesisir Selatan yang kembali meningkat merupakan pertanda kurang baik bagi investasi Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V

PENUTUP

PDRB
ADHB

2019**

*Pengeluaran Konsumsi Akhir
Rumah Tangga (PK-RT)*

7.711,44
miliar rupiah

165,55
miliar rupiah

*Pengeluaran Konsumsi Akhir
Lembaga Non-Profit yang Melayani
Rumah Tangga (PK-RT)*

*Pengeluaran Konsumsi Akhir
Pemerintah (PK-P)*

1.763,28
miliar rupiah

4.239,25
miliar rupiah

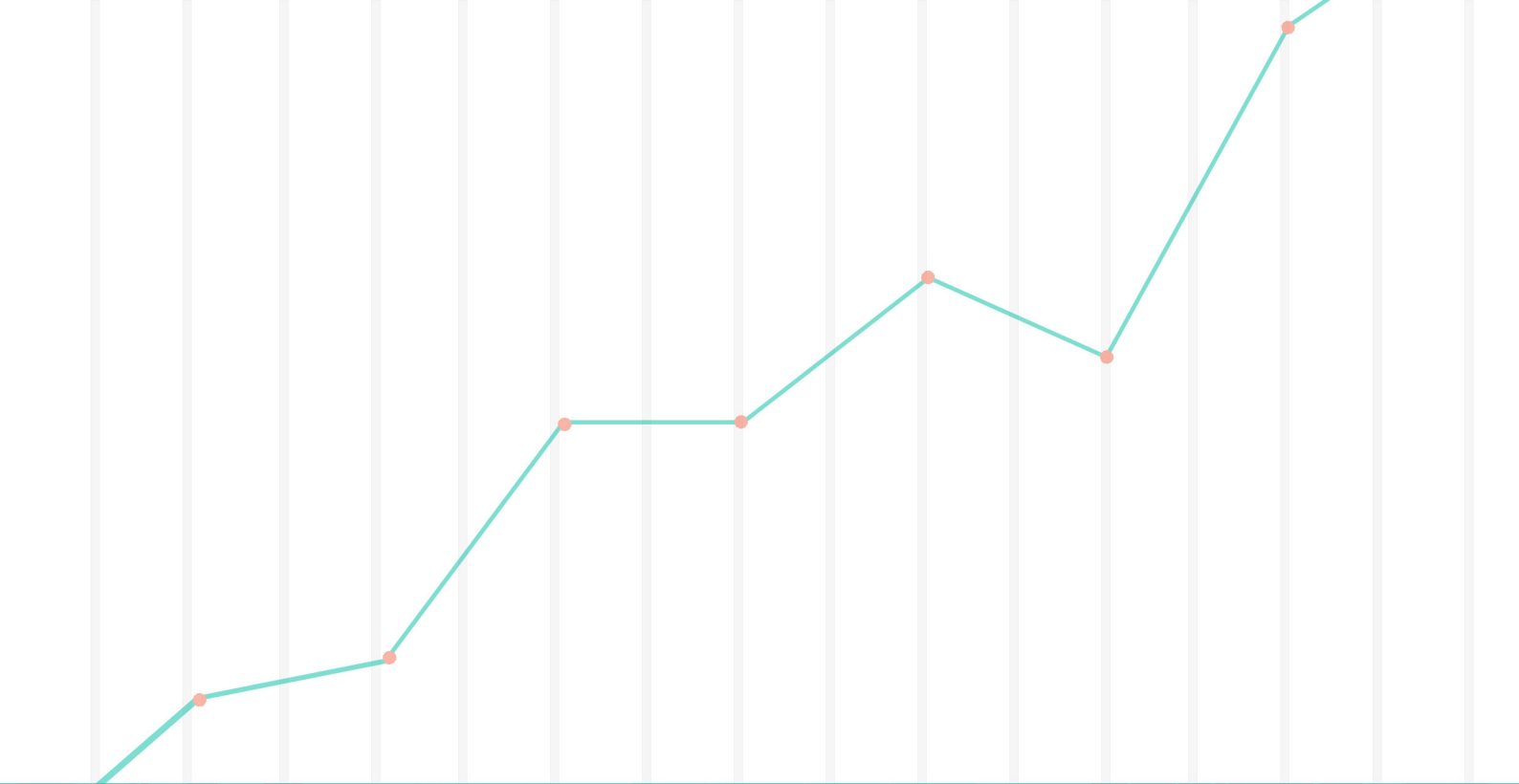
*Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)*

**angka sangat sementara

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran periode 2015-2019 menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB menurut pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, pemerintah dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB menurut pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi seperti penduduk dan rumah tangga, sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 mencapai 14.044,81 miliar rupiah, sementara atas dasar harga konstan adalah sebesar 9.582,87 miliar rupiah. Kontribusi pengeluaran konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah mencapai 68,64 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah sebesar 4,81 persen.
4. Seluruh data, indikator dan ulasan yang ditampilkan dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk berbagai keperluan seperti perencanaan, evaluasi dan berbagai analisis ekonomi lainnya. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Secara langsung maupun tidak langsung juga dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha dan Tabel Input-Output.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2015-2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	5.621,03	6.080,21	6.517,29	7.067,22	7.711,44
2	Konsumsi Akhir LNPRT	116,84	128,57	132,72	144,00	165,55
3	Konsumsi Akhir Pemerintah	1.362,78	1.454,25	1.501,56	1.621,48	1.763,28
4	PMTB	3.149,46	3.435,99	3.659,13	3.911,70	4.239,25
5	Perubahan Inventori	316,89	144,87	7,32	10,52	-5,51
6	Ekspor	5.851,07	7.052,29	8.536,86	8.752,30	9.282,97
7	Impor	6.220,89	7.024,78	8.285,36	8.457,54	9.112,17
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)		10.197,17	11.271,40	12.069,52	13.049,68	14.044,81

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2015-2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	4.204,45	4.403,46	4.632,33	4.859,46	5.080,68
2	Konsumsi Akhir LNPRT	91,59	95,93	100,16	106,23	119,88
3	Konsumsi Akhir Pemerintah	981,59	990,68	983,46	1.031,77	1.084,46
4	PMTB	2.376,50	2.539,10	2.653,75	2.746,66	2.870,70
5	Perubahan Inventori	237,37	104,75	5,17	7,18	-3,36
6	Ekspor	4.917,80	5.430,57	6.012,08	6.123,67	6.552,43
7	Impor	4.993,08	5.331,91	5.708,89	5.732,27	6.121,93
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)		7.816,21	8.232,59	8.678,05	9.142,70	9.582,87

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	55,12	53,94	54,00	54,16	54,91
2	Konsumsi Akhir LNPRT	1,15	1,14	1,10	1,10	1,18
3	Konsumsi Akhir Pemerintah	13,36	12,90	12,44	12,43	12,55
4	PMTB	30,89	30,48	30,32	29,98	30,18
5	Perubahan Inventori	3,11	1,29	0,06	0,08	-0,04
6	Ekspor	57,38	62,57	70,73	67,07	66,10
7	Impor	61,01	62,32	68,65	64,81	64,88
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	4,37	4,73	5,20	4,90	4,55
2	Konsumsi Akhir LNPRT	3,50	4,74	4,40	6,07	12,85
3	Konsumsi Akhir Pemerintah	9,04	0,93	-0,73	4,91	5,11
4	PMTB	4,81	6,84	4,52	3,50	4,52
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor	-	-	-	-	-
7	Impor	-	-	-	-	-
PDRB		5,73	5,33	5,41	5,35	4,81

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran, 2015-2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	133,69	138,08	140,69	145,43	151,78
2	Konsumsi Akhir LNPRT	127,56	134,02	132,52	135,55	138,09
3	Konsumsi Akhir Pemerintah	138,83	146,79	152,68	157,15	162,60
4	PMTB	132,53	135,32	137,89	142,42	147,67
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor	-	-	-	-	-
7	Impor	-	-	-	-	-
PDRB		130,46	136,91	139,08	142,73	146,56

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran (Persen), 2015-2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6,09	3,28	1,89	3,37	4,36
2	Konsumsi Akhir LNPRT	4,85	5,06	-1,13	2,29	1,87
3	Konsumsi Akhir Pemerintah	2,08	5,73	4,01	2,93	3,46
4	PMTB	7,10	2,11	1,89	3,29	3,69
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor	-	-	-	-	-
7	Impor	-	-	-	-	-
PDRB		5,82	4,94	1,58	2,63	2,68

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990, Jakarta.
- _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
- _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
- _____, *Statistik Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
- Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
- Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
- United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev. 3, New York, 1968.
- _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
- _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

_____, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

_____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.

Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.

Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jalan Setia Budi Painan, Telp (0756) 21004, Fax (0756) 21004
Website: <http://pesselkab.bps.go.id>, Email: bps1302@bps.go.id

ISBN 978-602-5481-66-6



9 786025 481666